

MODEL PENGELOLAAN PENYIARAN DIGITAL PADA PERSIAPAN *ANALOG SWITCH OFF* 2022 DI PROVINSI RIAU

Hisam Setiawan¹, Yasir², Suyanto³

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Indonesia¹²³

Email: hisamsetiawan99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atas model pengelolaan penyiaran digital pada persiapan *Analog Switch Off* (ASO) atau perpindahan televisi analog ke televisi digital di Provinsi Riau yang akan berlangsung pada 2 November 2022 mendatang. Kesiapan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Riau sebagai pengelola *Multiplexing* televisi digital dan kesiapan masyarakat dalam menerima siaran televisi digital di Provinsi Riau menjadi fokus utama. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus melalui wawancara dan teknik pengumpulan data observasi oleh Pemerintah Daerah, TVRI Riau, KPID Riau dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan penyiaran digital di Provinsi Riau dengan memperhatikan beberapa indikator (a). Kualitas Penyiaran Digital (infrastruktur *multiplexing* televisi digital), (b). Pilihan Program Siaran (program siaran televisi digital) (c). Dukungan Perangkat (ekosistem perangkat penerima siaran digital – *Set Top Box*) dan (d). Pengetahuan Masyarakat (sosialisasi kepada masyarakat) masih belum maksimal dalam upaya mendukung persiapan pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) di Provinsi Riau.

Kata Kunci: televisi digital, penyiaran digital, *analog switch off* (ASO), Provinsi Riau.

Abstract

This study aims to find out an overview of the digital broadcasting management model on the preparation of Analog Switch Off (ASO) or the migration of analog to digital television in Riau Province which will take place on November 2, 2022. The preparation of the Television of the Republic of Indonesia (TVRI) Riau as the manager of digital television multiplexing and the readiness of the community to receive digital television broadcasts in Riau Province are the main focus. This study uses a descriptive qualitative approach with case study research methods through interviews and observation data collection techniques of Local Government, TVRI Riau, KPID Riau and communities. The results show that the digital broadcasting management model in Riau Province takes into account several indicators (a). Digital Broadcasting Quality (digital television multiplexing infrastructure), (b). Choice of Broadcast Program (digital television broadcast program) (c). Device Support (digital broadcast receiving device ecosystem – Set Top Box) and (d). Public knowledge (socialization to the community) is still not optimal in an effort to support the preparation for the implementation of Analog Switch Off (ASO) in Riau Province.

Keywords: digital television, digital broadcasting, analog switch off (ASO), Riau Province.

PENDAHULUAN

Perjalanan digitalisasi penyiaran di Indonesia memasuki babak baru setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja khususnya klaster tentang penyiaran yang merupakan bagian dari kebijakan terhadap digitalisasi penyiaran dan implementasi *Analog Switch Off* (ASO) sesuai dengan amanat Pasal 60A ayat 2, dimana target ASO paling lambat tanggal 2 November 2022. ASO adalah penghentian siaran analog secara keseluruhan dan mengawali siaran digital secara penuh. Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 menjadi regulasi konvergensi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai mampu menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia (Supadiyanto, 2021).

Pelaksanaan ASO juga telah membuat televisi di Indonesia mempersiapkan perubahan untuk memasuki era penyiaran televisi digital terrestrial *free-to-air*/FTA (siaran tv digital gratis). Penyiaran televisi digital terrestrial merupakan siaran televisi tidak berbayar yang dipancarkan menggunakan teknologi digital secara terrestrial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima (antena *ultra high frequency* - UHF). Dan untuk pengelola multipleksing televisi digital pemerintah telah menetapkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) secara langsung sebagai salah satu penyelenggara mux tetap di seluruh daerah Indonesia. TVRI merupakan pengelola mux terbanyak, dengan memiliki 136 pemancar/frekuensi digital di berbagai daerah, dan akan ditingkatkan menjadi 260 (Bumninc.com diakses 09 Maret 2022). Untuk penyelenggara multipleksing lain yang berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau televisi swasta ditetapkan oleh pemerintah melalui proses seleksi dan umumnya berbeda di berbagai daerah.

Memasuki era penyiaran televisi digital terrestrial *free-to-air*/FTA (siaran televisi digital gratis) masyarakat telah banyak memperoleh informasi atas berbagai kemanfaatannya. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan beberapa manfaat televisi digital diantaranya terwujudnya keberagaman siaran (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*), masyarakat Indonesia akan mendapatkan layanan televisi lebih berkualitas dan interkatif, program tayangan televisi lebih beranekaragam, kualitas siaran lebih bersih, jernih dan canggih, kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk dan *Analog Switch Off* akan menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Melalui televisi digital juga diharapkan akses siaran televisi kepada masyarakat di Indonesia dapat diterima secara merata terutama di daerah yang susah menangkap siaran televisi pada saat televisi analog. (Siarandigital.kominfo.go.id diakses 09 Maret 2022).

Meski televisi digital menjanjikan berbagai kemanfaatan dan perubahan, namun berbagai kendala yang ada akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan perubahan teknologi siaran analog ke siaran digital terutama di tingkat daerah/provinsi. Beberapa tantangan dan permasalahan yang mendasar diantaranya pada aspek peralihan teknologi, kesiapan infrastruktur, persiapan lembaga penyiaran, begitu juga dengan kesiapan masyarakat dalam menerima siaran televisi digital. Karena sampai saat ini, melalui penyiaran televisi analog terrestrial saja, masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima siaran televisi dengan perangkat penerima siaran antena UHF. Hal ini dikarenakan masih minimnya

infrastruktur yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses siaran televisi analog teresterial tersebut.

Sistem penyiaran televisi analog teresterial sampai saat ini belum dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama yang berada di luar ibukota provinsi. Seperti di Provinsi Riau yang secara administrasi terdiri dari 12 kabupaten/kota, sistem penyiaran televisi analog teresterial *free-to-air*/FTA (siaran televisi analog gratis) hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di ibukota Provinsi Riau saja yaitu Kota Pekanbaru dengan menggunakan perangkat penerima siaran antena UHF karena termasuk dalam wilayah ekonomi maju. Sedangkan masyarakat yang berada di 11 kabupaten/kota lainnya untuk mendapatkan akses siaran televisi dengan memanfaatkan layanan televisi berbayar atau berlangganan seperti televisi satelit (parabola) dan televisi kabel yang beroperasi di wilayah tersebut yang termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Ketersediaan infrastruktur penyiaran televisi analog teresterial *free-to-air*/FTA (siaran televisi analog gratis) belum dapat menjangkau masyarakat yang berada di luar kota Pekanbaru.

Minimnya infrastruktur penyiaran televisi analog teresterial *free-to-air*/FTA baik itu dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam hal ini Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan juga Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau televisi swasta juga menyebabkan banyak masyarakat yang berada di luar kota pekanbaru enggan memanfaatkan perangkat penerima siaran teresterial *free-to-air*/FTA yaitu melalui antena UHF. Ditambah dengan televisi-televisi swasta banyak yang belum membangun infrastuktur penyiaran atau pemancar teresterial *free-to-air*/FTA di luar kota Pekanbaru karena secara bisnis kurang menguntungkan. (Antaraneews.com, diakses 09 Maret 2022).

Walaupun amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah menetapkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini Televisi Republik Indonesia (TVRI) harusnya dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan masyarakat dalam sistem penyiaran. Terutama untuk menjangkau seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Namun TVRI sebagai televisi publik sampai saat ini juga masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terbukti masih terdapat wilayah di Indonesia khususnya wilayah perbatasan dan pedalaman yang masyarakatnya masih belum mendapatkan akses siaran TVRI. (Antaraneews.com, diakses pada 09 Maret 2022).

Untuk wilayah Provinsi Riau, TVRI Stasiun Riau masih mendapati tantangan yang cukup berarti dalam menjangkau seluruh masyarakat Riau yang tersebar di 12 kabupaten/kota dimana 7 kabupaten/kota termasuk dalam wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Atas dasar kekurangan anggaran dan biaya untuk memaksimalkan infrastruktur dan pemancar transmisi analog yang sudah dimakan usia dan hal ini menyebabkan belum maksimalnya siaran TVRI Riau dapat diterima oleh masyarakat Riau. Begitu juga halnya dalam pengelolaan program siaran, minimnya minat masyarakat untuk menonton siaran dari TVRI Riau. Disebabkan sumber daya manusia yang terbatas ditambah dengan masih minimnya kreatifitas untuk menghasilkan siaran-siaran yang bermutu dan berkualitas. Bahkan bagi masyarakat yang masih memanfaatkan perangkat penerima siaran televisi analog teresterial *free to air*/FTA menggunakan antena *ultra high frequency*/UHF di daerah

tersebut khususnya di wilayah perbatasan lebih memilih untuk menonton siaran yang mereka dapatkan dari negara tetangga seperti siaran Malaysia. Tentunya hal ini menjadi tidak baik dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi terkini, menjadi penting untuk melihat seberapa jauh persiapan TVRI Riau menjadi pengelola multiplexing televisi digital di seluruh wilayah layanan Provinsi Riau.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai *leading sector* dalam persiapan pelaksanaan ASO ini telah merancang jadwal penghentian siaran televisi analog ke digital untuk seluruh Indonesia secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak hal untuk mempersiapkan agar proses peralihan berjalan mulus berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Beberapa pertimbangan itu adalah rujukan standar yang ditetapkan *International Telecommunication Union* (ITU) yaitu faktor kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio dan kemampuan teknologi siaran digital. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Provinsi Riau terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah layanan akan menjalani jadwal penghentian ASO bertahap sebagai berikut:

Tabel. Tahapan *Analog Switch Off* (ASO) Bertahap di Provinsi Riau.

| No | Tahapan | Wilayah Layanan | Kabupaten/Kota |
|----|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Tahap I | Riau - 1 | Pekanbaru, Kampar |
| | 30 April 2022 | Riau - 4 | Dumai, Bengkalis, Kep. Meranti |
| 2 | Tahap II | Riau - 5 | Siak, Pelalawan, Kuansing |
| | 25 Agustus 2022 | | |
| 3 | Tahap III | Riau - 3 | Rokan Hilir |
| | 2 November 2022 | Riau - 7 | Indragiri Hilir |

Sumber: www.siarandigital.kominfo.go.id

Dari tujuh wilayah layanan di Provinsi Riau, lima yang terdampak *Analog Switch Off* (ASO). Artinya, lima daerah saja mengalami pengakhiran siaran televisi analog. Sedangkan dua wilayah lainnya yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hulu termasuk kategori *blank spot* tidak akan mengalami penghentian siaran televisi analog. Daerah *blank spot* ini masuk dalam proyek *Digital Broadcasting System*, sebagai bagian tahap akhir digitalisasi siaran televisi di Indonesia. (Siarandigital.kominfo.go.id diakses 15 Maret 2022).

Tentunya, dengan peralihan televisi analog ke digital akan berdampak terhadap kondisi dan kesiapan masyarakat khususnya di Provinsi Riau untuk menerima siaran televisi digital. Baik dari sisi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan perubahan teknologi serta penyebaran informasi secara komprehensif tentang televisi digital yang disampaikan secara sederhana untuk masyarakat baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak baik tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau serta pihak-pihak lainnya. Belum lagi konsekuensi yang akan diterima oleh

masyarakat dalam memperoleh siaran televisi digital pada aspek perubahan teknologi, terutama untuk rumah tangga miskin yang secara teknologi dalam penerapan peralihan siaran televisi teresterial *free to air/FTA* dari analog ke digital membutuhkan tambahan alat bantu atau yang biasa disebut dengan *Set Top Box* (STB). STB merupakan sebuah perangkat yang mengkonversi sinyal digital kembali ke analog, sehingga dapat menyaksikan televisi teresterial *free-to-air/FTA* digital pada perangkat televisi analog (Jamroni, 2010). Rencana ASO ini dalam prakteknya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat dalam menyediakan perangkat penerima siaran televisi digital di rumahnya. Dalam rangka menunjang keberhasilan migrasi ke siaran digital terestrial, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah pendistribusian perangkat penerima siaran digital kepada masyarakat secara merata. Negara Malaysia melakukan kebijakan untuk mempercepat migrasi televisi digital, salah satunya dengan memberikan STB secara gratis pada warga yang kurang mampu untuk dapat menerima sinyal televisi digital (Ariyanti dkk., 2018). Hal ini akan berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat di Provinsi Riau dalam proses peralihan televisi analog ke digital terkhusus untuk masyarakat dan rumah tangga miskin dalam menerima siaran televisi digital teresterial sebagai bagian dalam mempersiapkan *Analog Switch Off* (ASO) di Provinsi Riau.

Berdasarkan sejumlah kondisi dan fenomena yang terjadi ini, didukung dengan berbagai alasan dan latar belakang diatas, peneliti ingin mengangkat permasalahan terkait dengan bagaimana Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan *Analog Switch Off* 2022 di Provinsi Riau. Penelitian akan difokuskan pada bagaimana persiapan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Riau sebagai pengelola *Multiplexing* (Mux) dalam proses peralihan televisi terestrial *free to air/FTA* dari siaran analog ke digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau dan juga bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerima siaran televisi digital terestrial *free to air/FTA* di Provinsi Riau.

KERANGKA TEORI

Penyiaran Digital

Implementasi teknologi penyiaran televisi digital bukanlah rekayasa dan upaya yang mengharuskan pemirsa menggunakan pesawat televisi baru yang digital. Upaya ini lebih terfokus pada sinyal digital yang ditransmisikan dari pemancar, sehingga pesawat televisi yang ada pada pemirsa cukup ditambahi perangkat *set-top box* (STB) agar dapat menerima sinyal televisi digital. Sistem penyiaran digital berjalan melalui *multiplexing* dan kompresi yang menggabungkan sejumlah *audio/data stream* ke dalam satu kanal penyiaran. Setiap stasiun menempati slot di *multiplex* dengan *bit rate* yang sama atau berbeda sesuai kebutuhan. Teknologi *multiplexing* ini sendiri memungkinkan dilakukannya pelebaran kanal frekuensi. Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu saluran siaran, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam saluran siaran sekaligus (Rianto et al., 2012).

Analog Switch Off (ASO)

Penghentian siaran analog (*analog switch/sign-off*, disingkat ASO), disebut juga dengan transisi televisi digital, peralihan ke siaran digital, digitalisasi

televisi atau migrasi digital adalah suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi ke dan digantikan oleh televisi digital. Dilakukan oleh masing-masing negara pada jadwal yang berbeda, melibatkan terutama konversi infrastruktur penyiaran televisi terestrial analog menjadi terestrial digital, manfaat utamanya adalah frekuensi tambahan pada spektrum radio dan biaya siaran yang lebih rendah, serta kualitas tontonan yang lebih baik untuk konsumen. ASO adalah penghentian siaran analog secara keseluruhan dan mengawali siaran digital secara penuh. Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 menjadi regulasi konvergensi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai mampu menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia (Supadiyanto, 2021).

Pemerintah menetapkan bahwa ASO diterapkan selambat-lambatnya dua tahun dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, atau pada 2 November 2022. Dan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Tahapan *Analog Switch Off* (ASO) di Indonesia dilakukan secara bertahap. Dimana ASO Tahap I akan dilaksanakan pada 30 April 2022 berlangsung di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten/kota. Tahap II akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2022 dan akan berlangsung di 11 wilayah layanan siaran atau 110 kabupaten/kota. Sedangkan Tahap III akan berakhir pada 2 November 2022 dan berlangsung di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kabupaten/kota. (Cnbcindonesia.com, diakses pada 30 Maret 2022).

Penyiaran Publik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan dibentuknya penyiaran untuk publik melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik untuk jasa penyiaran televisi terdapat Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan jasa penyiaran radio ada Radio Republik Indonesia (RRI). Definisi Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

Lembaga Penyiaran Publik mempunyai empat prinsip. Pertama siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*). Kedua siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiga programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional. Keempat penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Menurut Effendi Ghazali (dalam Irawan, 2010), LPP memiliki empat konsekuensi. Pertama, akses publik, yaitu adanya kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses siaran stasiun televisi atau radio tersebut. Secara praktis,

berarti bersedia untuk mendirikan stasiun hingga ke pelosok-pelosok terpencil di saat stasiun televisi komersial enggan untuk menjangkau daerah tersebut terutama karena hitung-hitungan nilai ekonomis. Kedua, penggunaan dana publik, yaitu dana operasional lembaga penyiaran publik utamanya berasal dari dana publik baik yang dikelola negara misalnya APBN/APBD maupun penghimpunan dana yang dilakukan lembaga penyiaran publik bersama publiknya misalnya melalui sponsor yang tentu saja semuanya disupervisi dan dievaluasi oleh publik. Ketiga, tuntutan akan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam hal ini ada dua yaitu LPP harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program acaranya sesuai standar moral dan nilai publiknya serta akuntabilitas dalam hal operasional lembaga penyiaran tersebut misalnya dalam penggunaan dana, dan lain-lain. Keempat, adanya keterlibatan publik. Publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam lembaga penyiaran publik dan lembaga yang bersangkutan harus siap dan bersedia dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat salah satunya melalui lembaga yang bertugas men-supervisi lembaga siaran publik tersebut.

Diferensiasi

Diferensiasi merupakan kemampuan yang dilakukan perusahaan dalam mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur sebuah barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen (Kartajaya, 2004). Untuk menciptakan diferensiasi yang kuat, terdapat 3 dimensi yang dapat digunakan, yaitu : konten (apa yang ditawarkan), konteks (bagaimana cara menawarkan), dan infrastruktur (*enabler*). Diferensiasi suatu produk akan terbentuk dengan sendirinya setelah menentukan positioning yang akan digunakan sehingga sebuah produk akan mempunyai ciri khas tersendiri di banding para pesaingnya. Dalam diferensiasi terdapat tiga hal penting, yaitu *unique selling point*, strategi yang tepat, diferensiator yang baik.

METODE PENELITIAN

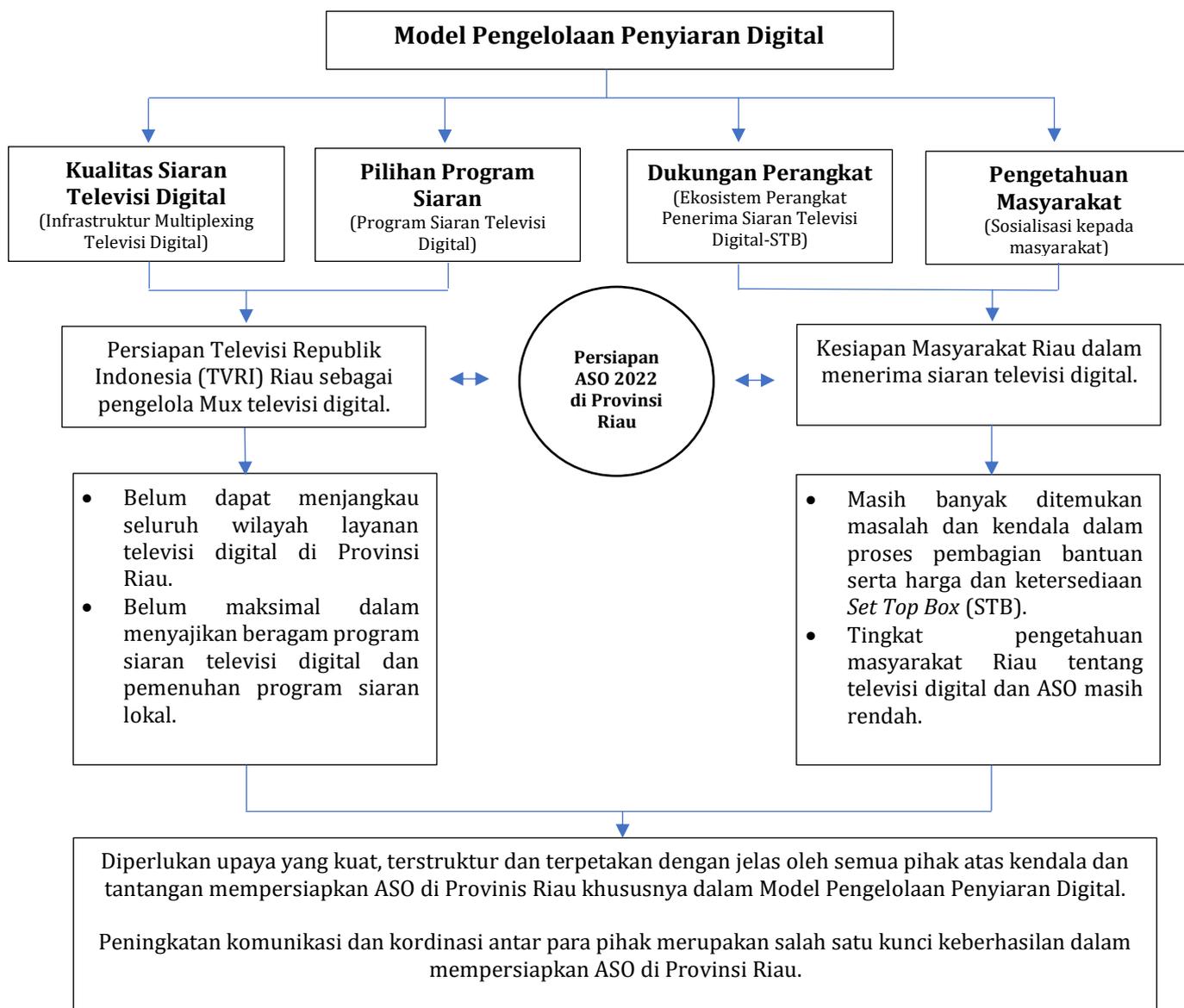
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*) karena memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2016:1). Metode studi kasus ini sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (*individu*), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti (Sugiyono, 2012). Subjek dalam penelitian ini bersasal dari organisasi dan pejabat serta masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penerapan *Analog Switch Off* (ASO) dan Digitalisasi Penyiaran di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari hasil pemikian Miles and Huberman (1984).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan *Analog Switch Off* (ASO) 2022 di Provinsi Riau diperoleh gambaran dan analisis yang menunjukkan bahwa empat pilar utama persiapan pelaksanaan kebijakan *Analog Switch Off* (ASO) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat dirumuskan menjadi sebuah Model Pengelolaan Penyiaran Digital terkhusus dalam pelaksanaan persiapan *Analog Switch Off* (ASO) di Provinsi Riau dengan beberapa indikator diantaranya kualitas penyiaran digital (infrastruktur multiplexing televisi digital), pilihan program siaran, perangkat penerima siaran televisi digital dan tingkat pengetahuan masyarakat. Berikut gambaran atas Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan ASO 2022 di Provinsi Riau.

Gambar. Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan *Analog Switch Off* (ASO) 2022 di Provinsi Riau



Sumber: *Pengelolaan Hasil Penelitian, (2022)*

Kualitas Penyiaran Digital (Infrastruktur *Multiplexing* Televisi Digital). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency, Provinsi Riau yang secara administrasi memiliki 12 kabupaten/kota dibagi menjadi 7 wilayah layanan televisi digital dimana dalam setiap wilayah layanan telah ditentukan pengelola multiplexing (Mux) televisi digital yaitu TVRI Stasiun Riau dan televisi swasta pemenang lelang Mux televisi digital oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Untuk wilayah layanan Riau-1 yaitu Pekanbaru dan Kampar, terdapat Trans TV Pekanbaru, TV One Pekanbaru (penyelenggara mux swasta) dan TVRI Pekanbaru sebagai pengelola mux. Riau-2 yaitu Rokan Hulu dan pengelola mux TVRI Pasir Pangaraian. Riau-3 yaitu Rokan Hilir belum tersedia pengelola mux TVRI. Riau-4 terdiri dari Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti terdapat TVRI Dumai, TVRI Sungai Pakning dan TVRI Selatpanjang. Riau-5 terdiri dari Pelalawan, Siak dan Taluk Kuantan ada TVRI Siak Sri Indrapura dan TVRI Baserah. Dan Riau-6 yaitu Indragiri Hulu dimana belum tersedia pengelola mux TVRI serta Riau-7 yaitu Indragiri Hilir dengan TVRI Tembilahan sebagai pengelola mux di wilayah ini.

TVRI Stasiun Riau sebagai salah satu penyelenggara multiplexing (Mux) tetap televisi digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau telah melakukan persiapan untuk peningkatan kualitas penyiaran digital terkait dengan infrastruktur stasiun pemancar dalam proses persiapan pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO). Berikut informasi status satuan transmisi TVRI Riau dalam mempersiapkan infrastruktur multiplexing Televisi Digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau per Mei 2022.

Tabel. Data Infrastruktur Multiplexing Televisi Digital TVRI Riau

| No | Transmisi | Kapasitas | Tahun | Status Mux | Keterangan |
|----|-------------------------|------------|-------|-------------|---|
| 1 | TVRI Pekanbaru | 5.000 Watt | 2016 | Digital-On | |
| 2 | TVRI Pasir Pangaraian | 1.000 Watt | 2020 | Digital-On | |
| 3 | TVRI Dumai | 600 Watt | 2021 | Digital-On | Kapasitas 2.000 Watt, terdapat kerusakan alat. |
| 4 | TVRI Sungai Pakning | 3.000 Watt | 2018 | Digital-On | |
| 5 | TVRI Selat Panjang | - | - | Belum Aktif | Terdapat masalah administrasi tentang status lahan pemancar. |
| 6 | TVRI Siak Sri Indrapura | - | - | Belum Aktif | Target Juli – Agustus 2022 Digital-On dengan kapasitas 2.000 watt |
| 7 | TVRI Baserah | - | - | Belum Aktif | Target pada 2023 dengan kapasitas 2.000 watt |
| 8 | TVRI Tembilahan | 1.000 Watt | 2021 | Digital-On | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|---|--|
| 9 | TVRI UjungTanjung (Rohil) | - | - | - | Pembangunan Transmisi on-progress. Target Agustus 2021. Telah mendapat hibah lahan seluas 1.990 m ² dari Pemkab Rokan Hilir. Kapasitas 5.000 watt |
| 10 | TVRI Indragiri Hulu | - | - | - | Belum tersedia trasnmisi, belum ada lahan hibah dari Pemkab Inhu, belum ada target untuk digital-on |

Sumber: TVRI Riau (2022)

Dari data dan informasi pada tabel diatas, terlihat bahwa dari 8 transmisi TVRI Riau di masing-masing daerah hanya 5 transmisi saja yang sudah digital-on sebagai pengelola mux televisi digital yaitu transmisi TVRI Pekanbaru, TVRI Pasir Pangaraian, TVRI Dumai, TVRI Sungai Pakning dan TVRI Tembilahan. Dan 3 satuan transmisi mengalami kendala sehingga belum aktif diantaranya transmisi TVRI Selat Panjang, TVRI Siak Sri Indrapura dan TVRI Baserah. Sedangkan untuk wilayah Rokan Hilir dan Indragiri Hulu masih dalam proses pembangunan transmisi.

Persiapan peralihan teknologi televisi analog ke televisi digital dalam sebuah model pengelolaan penyiaran digital di Provinsi Riau perlu mempertimbangkan hal yang terkait antara lain dengan tingkat adopsi inovasi masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur mux televisi digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini mengacu kepada teori difusi inovasi (*diffusion of innovations theory*) yang diperkenalkan oleh Rogers (1986). Teori difusi inovasi mencoba menjelaskan bagaimana sebuah inovasi (teknologi) dapat diterima ke dalam masyarakat, melalui suatu proses keputusan. Pengetahuan terjadi saat seorang individu mengetahui eksistensi suatu teknologi dan memahami cara kerja teknologi tersebut. Pengetahuan terdiri atas tiga jenis, yaitu kesadaran, pengetahuan prinsip, dan pengetahuan mengenai cara kerja. Kesadaran mendorong seseorang untuk sampai ke pengetahuan prinsip dan pengetahuan mengenai cara kerja (Rogers, 2003).

Sehingga secara keseluruhan dalam proses persiapan infrastruktur televisi digital oleh TVRI Riau sebagai pengelola mux tetap untuk wilayah layanan di Provinsi Riau masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Riau. Dengan target *Analog Switch Off* (ASO) pada 2 November 2022 dengan beberapa tahapan yang telah ditetapkan, secara kualitas penyiaran digital yang akan diterima oleh masyarakat masih belum begitu banyak berpengaruh secara signifikan dengan ketersediaan infrastruktur mux televisi digital yang ada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) di Provinsi Riau dalam aspek infrastruktur mux televisi digital yang diharapkan dapat memperluas jangkauan siaran dan akses masyarakat untuk dapat menerima siaran televisi digital secara merata belum terlaksana dengan baik. Dan hal ini sudah seharusnya dapat menjadi pertimbangan khusus dalam mempersiapkan ASO di Provinsi Riau dengan mempersiapkan infrastuktur di wilayah layanan yang sampai saat ini belum tersedia mux televisi digital.

Pilihan Program Siaran (program siaran televisi digital). Salah satu manfaat televisi digital yang sering dan selalu diinformasikan adalah masyarakat akan mendapatkan program tayangan televisi lebih beranekaragam dengan kualitas siaran

lebih bersih, jernih dan canggih. Namun berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan menunjukkan data bahwa sampai saat ini masyarakat masih belum mendapatkan program siaran tayangan televisi yang lebih beragam di beberapa daerah di Provinsi Riau.

Untuk wilayah layanan Riau-1 yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masyarakat mendapatkan program siaran televisi digital lebih beragam karena terdapat 3 (tiga) pengelola mux televisi digital diantaranya TVRI Pekanbaru, Trans TV Pekanbaru dan TV One Pekanbaru. Untuk mux TVRI Pekanbaru terdapat beberapa program siaran televisi diantaranya TVRI Nasional, TVRI Sport, TVRI World, TVRI Riau, TVRI Kepulauan Riau, Rajawali TV, Net TV dan Kompas TV. Dan mux Trans TV Pekanbaru membawa program siaran televisi seperti Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, SCTV, Indosiar dan Metro TV. Sedangkan mux TV One membawa program siaran televisi diantaranya TV One, ANTV, Riau TV, RCTI, MNC TV, iNews dan Sportone Pekanbaru. Sedangkan untuk wilayah layanan lainnya di Provinsi Riau seperti Riau-2 (Kabupaten Rokan Hulu), Riau-4 (Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Riau-7 (Kabupaten Indragiri Hilir) masyarakat tidak mendapatkan program siaran televisi digital yang beragam, karena hanya tersedia 4 (empat) siaran televisi digital diantaranya TVRI Nasional, TVRI Riau, TVRI World dan TVRI Sport yang bersumber hanya dari Mux Televisi Digital TVRI saja.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa wilayah layanan yang mendapatkan banyak pilihan program siaran hanya teradapt di wilayah layanan Riau 1 yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dan dari program siaran televisi digital yang tersedia terdapat beberapa program siaran baru yaitu TVRI Sport, TVRI World, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Dan untuk wilayah layanan Riau-1 masyarakat telah mendapatkan pilihan program siaran televisi digital dengan total 23 program siaran yang beragam dengan beberapa tambahan program siaran baru.

Namun tidak demikian untuk masyarakat yang berada di wilayah layanan lainnya. Masyarakat yang berada di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis dan Indragiri Hilir hanya dapat menonton siaran televisi digital dengan 4 program siaran, program siaran existing yaitu TVRI Nasional dan TVRI Riau (Lokal) dan program siaran baru yaitu TVRI Sport dan TVRI World. Hal ini juga yang menyebabkan minat masyarakat di wilayah ini sangat rendah untuk berpindah ke televisi digital walaupun infrastruktur mux televisi digital telah tersedia di daerah tersebut. Selain itu, tayangan siaran dari TVRI ini tidak juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menonton siaran dari televisi swasta yang ada. McLuhan berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi hal lainnya. Sejalan dengan teori determinisme teknologi dimana teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sebuah teknologi terutama media sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan, merasakan dan melakukan suatu tindakan tertentu (Nurudin, 2015:185). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marwiyati & Wahyudin, 2019) yang menyatakan bahwa hasil uji coba siaran digital oleh LPP TVRI Stasiun Jawa tengah belum bisa menjangkau semua wilayah masyarakat Jawa Tengah, karena terkendala infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

Ditambah dengan pemenuhan kepentingan masyarakat akan siaran lokal belum juga maksimal disediakan oleh TVRI Stasiun Riau sebagai televisi publik di Provinsi Riau. Dengan peralihan televisi analog ke televisi digital, program siaran

TVRI Riau mendapatkan 1 slot kanal yang siap bersiaran selama 24 jam penuh dalam sehari. Namun pada pelaksanaannya masih saja program siaran TVRI Riau bersiaran hanya 4 jam dalam sehari yaitu mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 Wib setiap harinya. Masih sama ketika saat penyiaran televisi analog. Diakui, hal ini memang menjadi keputusan TVRI Nasional (Pusat) berdasarkan Surat Edaran Direktur Utama TVRI dan berlaku untuk seluruh TVRI Stasiun di seluruh Indonesia. Selain itu juga, persoalan klasik yang selalu merundung TVRI di daerah yaitu persoalan anggaran yang minim sehingga tidak dapat menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, pengembangan sumber daya manusia yang handal untuk menyediakan siaran-siaran lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, pengelolaan program siaran TVRI Riau dalam persiapan ASO di Provinsi Riau perlu mendapatkan perhatian lebih demi terutama dalam aspek dukungan anggaran dan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk dapat menyajikan siaran lokal yang informatif, mendidik dan hiburan yang sehat untuk masyarakat di Provinsi Riau.

Dukungan Perangkat (ekosistem perangkat penerima siaran digital – *Set Top Box*). Persiapan pelaksanaan ASO ini dalam prakteknya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat luas untuk memperluas ekosistem perangkat penerima siaran digital di masing-masing wilayah layanan yang telah tersedia infrastruktur *multiplexing* televisi digital dengan menyediakan perangkat penerima siaran televisi digital yaitu *Set Top Box* (STB). STB merupakan alat penangkap sinyal siaran digital yang disambungkan pada televisi dan antena UHF sehingga dapat menyaksikan televisi terestrial *free-to-air/FTA* digital pada perangkat televisi analog. Karena untuk masyarakat yang memiliki televisi namun belum bisa menerima siaran digital membutuhkan piranti tambahan STB.

Dalam rangka menunjang keberhasilan ASO, salah satu upaya pemerintah yaitu menyediakan STB gratis kepada masyarakat khususnya untuk rumah tangga miskin/kurang mampu berpedoman pada Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Dimana penyediaan STB gratis ini berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing televisi swasta dan bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN).

Tabel: Total dan Sebaran Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan STB

| Tahap ASO | Kab/Kota | Jumlah | Deadline Pelaksanaan |
|---------------|------------|------------------|----------------------|
| ASO Tahap I | 166 | 3.203.854 | 30 April 2022 |
| ASO Tahap II | 110 | 2.165.890 | 25 Agustus 2022 |
| ASO Tahap III | 65 | 1.386.227 | 2 November 2022 |
| TOTAL | 341 | 6.737.971 | |

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022)

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Plate menyampaikan, tidak semua masyarakat akan mendapatkan STB gratis, penerima STB gratis adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial

RI. Dari data tersebut tercatat 7,9 juta rumah tangga miskin, dimana 6,7 juta diantaranya berada di wilayah yang akan terdampak ASO. Sehingga diasumsikan 6,7 juta rumah tangga tersebut memiliki televisi analog. Jadi acuanya untuk penerima STB gratis mereka semua punya televisi analog (Kompas.com). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi STB gratis diharuskan membeli secara mandiri untuk dapat menonton siaran televisi digital teresterial.

Untuk Provinsi Riau, total rumah tangga miskin penerima bantuan STB pada ASO Tahap I untuk wilayah layanan Riau-1 (Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar) dan Riau-4 (Kota Dumai, Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti) sebanyak 65.595 unit berdasarkan data Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 65/HM/KOMINFO/02/2022 dengan sebaran dan sumber bantuan sebagai berikut:

Tabel: Total dan Sebaran Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan STB pada ASO Tahap I

di Provinsi Riau.

| No | Sumber | Wilayah Layanan | Kab/Kota | Jumlah Unit |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Bantuan Pemerintah | Riau-4 | Dumai | 7.402 |
| | | | Bengkalis | 12.163 |
| | | | Kepulauan Meranti | 12.666 |
| 2 | TV One | Riau-1 | Pekanbaru | 5.157 |
| 3 | Trans TV | Riau-1 | Kampar | 3.735 |
| 4 | Indosiar | Riau-1 | Pekanbaru | 1.966 |
| | | | Kampar | 6.267 |
| 5 | RCTI | Riau-1 | Pekanbaru | 1.476 |
| | | | Kampar | 5.624 |
| 6 | Metro TV | Riau-1 | Pekanbaru | 542 |
| | | | Kampar | 3.052 |
| 7 | Rajawali TV | Riau-1 | Pekanbaru | 1.766 |
| | | | Kampar | 3.779 |
| TOTAL | | | | 65.595 |

Sumber: Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022)

Pembagian STB gratis untuk ASO Tahap I di Provinsi Riau dilakukan dengan 2 mekanisme, dimana untuk STB yang berasal dari bantuan pemerintah pendistribusian dan instalasi dilakukan oleh PT. Pos Indonesia sedangkan STB dari komitmen penyelenggara mux televisi swasta dilakukan secara mandiri. Dari proses pembagian STB ini terdapat beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi, jumlah data penerima STB gratis untuk rumah tangga masih belum memenuhi jumlah DTKS di Provinsi Riau. Dimana per 22 Maret 2022 jumlah DTKS Provinsi Riau dengan total

keluarga sebesar 840.795 yang bersumber dari Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial. Sehingga dari 65.595 rumah tangga miskin penerima bantuan STB pada ASO Tahap I, masih banyak tersisa rumah tangga atau keluarga miskin di Provinsi Riau yang belum mendapatkan bantuan STB ini. Walaupun masih tersisa 2 tahapan ASO tersisa sampai pada 2 November 2022 mendatang. Tantangan lainnya adalah proses pembagian dan instalasi bantuan STB ini juga dirasakan cukup rumit. Karena masih terdapat kesalahan data penerima bantuan STB yang tertera berdasarkan nama dan alamat rumah tidak sesuai dengan data yang diterima dilapangan. Terdapat perubahan alamat yang tidak dilakukan pembaharuan data sampai alamat tidak sesuai dilapangan.

Selain itu, koordinasi antara para pihak dalam proses pembagian bantuan STB ini belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat kendala yang cukup berarti di tingkat lapangan dalam penyebaran dan instalasi bantuan STB untuk rumah tangga miskin ini di Provinsi Riau. Dimana, salah satu bantuan STB yang berasal dari pemerintah dilakukan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi salah satu wilayah perbatasan di Provinsi Riau dengan jumlah STB sebanyak 12.666 unit yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia. Sementara, secara infrastruktur TVRI Riau dengan satuan transmisi TVRI Selat Panjang masih belum aktif untuk bersiaran baik secara analog dan digital, namun bantuan STB untuk rumah tangga miskin telah dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, ketika masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti ingin mencoba menerima siaran televisi digital dengan menggunakan bantuan STB gratis dari pemerintah program siaran dari dalam negeri yang berasal dari TVRI tidak tersedia, melainkan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura karena program siaran dalam negeri belum tersedia dikarenakan infratsuktur mux televisi digital belum aktif di daerah ini. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi dan memahami cara kerja teknologi khususnya atas perangkat penerima siaran televisi digital STB ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk beralih teknologi dari televisi analog dan digital dengan membeli perangkat STB tersebut. Pengetahuan prinsip dan cara kerja teknologi merupakan proses penting bagi suatu individu dalam mengaktualisasikan minatnya dalam membeli atau menggunakan suatu teknologi (Rogers, 2003). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Yuniarti & Ariyanti, 2022) yang menunjukkan semakin tinggi pengetahuan masyarakat terhadap televisi digital, semakin besar minat masyarakat dalam membeli perangkat penerima siaran televisi digital.

Dengan kondisi seperti ini harus lebih menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak dalam mempersiapkan ASO di Provinsi Riau dengan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik di tingkat pemerintah, lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan tentunya masyarakat sebagai penerima bantuan STB agar dapat mempersiapkan perencanaan yang lebih baik dalam proses pendistribusian dan instalasi bantuan STB untuk rumah tangga miskin di Provinsi Riau sampai pada tahap terakhir ASO yang akan berlangsung pada 2 November 2022 kedepan.

Pengetahuan Masyarakat (sosialisasi kepada masyarakat). Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Juni – Juli 2021 telah melakukan survei tentang kesiapan masyarakat di Provinsi Riau terhadap siaran televisi digital dengan temuan diantaranya tentang pengetahuan masyarakat akan televisi digital, sebanyak 86,33% memberikan respon tidak tahu, 13,67% sudah tahu, dan kapan akan beralih ke televisi

digital dengan responden yang belum beralih ke siaran televisi digital) sebanyak 5,88% menjawab sesegera mungkin, 12,12% kalau siaran televisi analog sudah terhenti dan 49,83% belum tahu. Dilanjut dengan pertanyaan dari mana sumber mendapatkan ajakan untuk beralih ke televisi digital, sebanyak 68,75% menjawab dari televisi, 39,58% melalui internet, 10,53% dari sosial media dan 7.02% melalui surat kabar.

Upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang televisi digital dan program *Analog Switch Off (ASO)* yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah banyak dilakukan dengan menggunakan beragam strategi dan konsep sosialisasi mulai dari sosialisasi ke masing-masing daerah, melaksanakan webinar secara online, sosialisasi dengan menggunakan media elektronik (televisi dan radio) serta media cetak, menyiapkan platform digital dengan menghadirkan media informasi Siaran Digital, yang dapat diakses secara online melalui situs <https://siarandigital.kominfo.go.id/>, pemanfaatan media sosial, sampai dengan menyediakan aplikasi untuk pencarian sinyal digital yang berbasiskan titik kordinat yaitu aplikasi sinyal tv digital yang bisa diunduh di playstore appstore.

Namun demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan ini, khusus untuk di Provinsi Riau masih belum efektif karena belum begitu menysasar langsung pada masyarakat di lapisan bawah terutama di daerah-daerah kabupaten/kota. Dengan karakteristik wilayah di Provinsi Riau yang berbeda penerapan dan persiapan ASO, baik secara infrastruktur mux televisi digital yang tersedia, ketersediaan pilihan program siaran dan kebanyakan masyarakat di daerah yang belum banyak menggunakan antena UHF dalam mendapatkan siaran televisi menjadi kendala tersendiri dalam melakukan sosialisasi tentang televisi digital. Sedangkan bahan materi dan konsep sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI masih disiapkan dan disebarakan secara umum (*general*). Hal ini menjadi kendala dan tantangan sendiri dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi Riau sebagai bagian dalam meningkatkan pengetahuan tentang televisi digital dan upaya mempersiapkan masyarakat dalam program ASO di Provinsi Riau.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai perwakilan masyarakat bidang penyiaran di Provinsi Riau mencoba melaksanakan konsep sosialisasi yang lebih terkonsep berdasarkan karakteristik penerapan televisi digital dan program ASO di Provinsi Riau yang berbeda pada masing-masing wilayah. Dengan menyusun kategori wilayah diantaranya daerah yang terdampak ASO dan daerah yang tidak terdampak ASO berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan pilihan program siaran televisi digital yang tersedia. Pastinya, bahan materi dan substansi sosialisasi akan disampaikan berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah dalam penerapan televisi digital. Hal ini tentunya dapat memberikan jawaban atas kebingungan dan ketidakpahaman masyarakat dalam memperoleh informasi tentang televisi digital dan persiapan ASO di Provinsi Riau. Salah satu contoh sederhana yaitu tentang keberagaman siaran ketika beralih ke televisi digital, dimana untuk wilayah layanan yang telah tersedia mux televisi swasta dapat menerima siaran yang lebih beragam, namun dalam wilayah layanan yang hanya tersedia mux TVRI Riau hanya dapat menerima siaran terbatas.

KPID Riau dalam melaksanakan sosialisasi ASO di Provinsi Riau dimulai dengan melakukan kordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dilanjutkan dengan melibatkan para

pihak termasuk lembaga penyiaran sebagai pengelola mux di setiap wilayah layanan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi televisi digital dan turun langsung ke masyarakat sampai tingkatan rukun tetanga untuk melakukan sosialisasi tentang televisi digital dan persiapan ASO di Provinsi Riau secara komprehensif. Walau dengan dukungan anggaran secara mandiri dan terbatas, upaya sosialisasi diharapkan dapat menjadi bukti atas tanggungjawab dan amanah KPID Riau sebagai perwakilan masyarakat dalam bidang penyiaran di Provinsi Riau. Serta dilanjutkan dengan melaksanakan rapat kordinasi dan evaluasi dengan berbagai pihak untuk dapat selalu mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini persiapan atas penerapan televisi digital dan ASO sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan persiapan ASO di Provinsi Riau.

Dalam kondisi seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam peralihan teknologi televisi analog ke televisi digital atau ASO di Provinsi Riau bergantung kepada lokasi, ketersediaan dan kondisi infrastruktur mux televisi digital yang tersedia wilayah tempat tinggal masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan pokok gagasan dari teori determinasi teknologi bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial diantara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri (McLuhan & Lapham, 1994). McLuhan berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling memperngaruhi hal lainnya. Secara umum dijelaskan bagaimana sebuah teknologi terutama media sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan, merasakan dan melakukan suatu tindakan tertentu. Lebih lanjut bahwa pengetahuan prinsip dan cara kerja teknologi merupakan proses penting bagi suatu individu dalam mengaktualisasikan minatnya dalam membeli atau menggunakan suatu teknologi (Rogers, 2003). Menurut Rogers (2003), pengetahuan terjadi saat seorang individu mengetahui eksistensi suatu teknologi dan memahami cara kerja teknologi tersebut. Pengetahuan terdiri atas tiga jenis, yaitu kesadaran, pengetahuan prinsip, dan pengetahuan mengenai cara kerja. Kesadaran mendorong seseorang untuk sampai ke pengetahuan prinsip dan pengetahuan mengenai cara kerja. Pengetahuan prinsip terdiri dari informasi yang terkait dengan fungsi prinsip yang mendasari bagaimana suatu teknologi bekerja. Pengetahuan mengenai cara kerja terdiri dari informasi yang diperlukan untuk menggunakan suatu teknologi dengan baik. Pengetahuan mengenai cara kerja lebih diperlukan untuk teknologi yang lebih kompleks.

Walaupun demikian, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang penerapan televisi digital dan persiapan ASO di Provinsi Riau harus terus ditingkatkan. Kordinasi, komunikasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta dukungan para pihak juga harus terus ditingkatkan. Serta pemilihan sistem sosialisasi berdasarkan wilayah juga harus menjadi pertimbangan dalam memberikan sosialisasi tentang televisi digital di Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Televisi Republik Indonesia (TVRI) Riau sebagai pengelola *multipleksing* (mux) televisi digital tetap masih belum maksimal dalam menyediakan infrastruktur mux televisi digital dan menghadirkan beragam program siaran televisi digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau. Ketersediaan perangkat penerima siaran digital atau *Set Top Box* (STB) untuk rumah tangga miskin dan pengetahuan

masyarakat tentang televisi digital belum berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan peralihan teknologi dalam menerima siaran televisi digital di Provinsi Riau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan penyiaran digital di Provinsi Riau baik dari aspek ketersediaan infrastruktur, pilihan program siaran, dukungan perangkat penerima siaran televisi digital serta tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang televisi digital masih belum maksimal dalam upaya mendukung persiapan pelaksanaan *Analog Switch Off (ASO)* di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiarto, H., Tjahjono, B. H., Rufiyanto, A., Kusuma, A. A. N. A., Hendratoro, G., & Dharmanto, S. (2007). *Sistem TV Digital Dan Prospeknya Di Indonesia*. Jakarta, PT. Multikom.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications.
- Faturrohman, M. (2016). *Model-Model Pembelajaran Inovatif* (2nd ed.). Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Irawan, A. (2010). Merevitalisasi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. In Y. Widodo (Ed.), *Quo Vadis Televisi? Masa Depan Televisi dan Televisi Masa Depan*. Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- McLuhan, M., & Lapham, L. H. (1994). *Understanding Media: The Extensions of Man*. London, The MIT Press.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2015). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Rahardjo, M. (2018). *Paradigma Interpretif*. Malang, Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/2438>.
- Rianto, P., Wahyono, B., Yusuf, I. A., Zuhri, S., Cahyono, M. F., Rahayu, Masduki, & Siregar, A. E. (2012). *Digitalisasi Televisi Di Indonesia : Ekonomi Politik, Peta Persoalan, Dan Rekomendasi Kebijakan*. Yogyakarta, PR2Media - Yayasan Tifa.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (Fifth Ed.)*. The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co, Inc.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2011). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta, Salemba Empat.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: design amd methods*. London: SAGE Publication.

Jurnal:

- Adnjani, M. D., & Mubarok. (2018). Strategi Sosialisasi Migrasi Sistem Penyiaran Analog Ke Digital di Jawa Tengah. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 755-766.

- Ariyanti, S., & Yuniarti, D. (2020). Challenges and opportunities for Integrated Broadcast Broadband (IBB) implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1502(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1502/1/012018>
- Budhirianto, S. (2014). Sikap Masyarakat Terhadap Kampanye Televisi Digital Pada Media Televisi. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 189–208.
- Budiman, A. (2015). Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia. *Jurnal Politika*, 6(2).
- Ismail, E., Sari, S. D. S. R., & Tresnawati, Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat bagi Rakyat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2).
- Jamroni. (2010). Perencanaan Strategi Penerapan Teknologi DVB-T di LPP TVRI. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 1(2).
- Mairita, D., M. Tazri, M. T., & Sumayah, S. (2021). Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau dalam Mengawasi Digitalisasi Penyiaran. *Syntax Idea*, 3(7), 1565. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1305>
- Marwiyati, & Wahyudin, A. (2019). Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital di LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 156–165.
- Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Wahana*, 1(10).
- Saefudin, A. (2008). Perkembangan Teknologi Komunikasi: Perspektif Komunikasi Peradaban. *Jurnal Mediator*, 9(2).
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Supadiyanto, S. (2021). Regulation Issues of Digital Broadcasting in Job Creation Law. *Jurnal ASPIKOM*, 6(2), 329. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.894>
- Sutanto, V. W., & Alatas, S. (2015). Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Yuniarti, D., & Ariyanti, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Terhadap TV Digital Terrestrial (DTT) dan Penggunaan Media terhadap Minat dalam Membeli Perangkat Penerima Siaran DTT. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 19(2), 137. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190205>

Sumber Lain:

- Antaraneews.com, *KPI: Rekomendasi "Free To Air" Demi Kepentingan Daerah Marjinal*. (<https://www.antaraneews.com/berita/1099706/kpi-rekomendasi-free-to-air-demi-kepentingan-daerah-marjinal>). (Artikel diakses 9 Maret 2022).
- Bumninc.com, *Migrasi Siaran Analog ke Digital, LPP TVRI Siapkan 120 Pemancar*. (<https://bumninc.com/migrasi-siaran-analog-ke-digital-lpp-tvri-siapkan-120-pemancar/?more=2>). (Artikel diakses 30 Maret 2022).
- CNBCIndonesia.com, *Kominfo Siap Mantikan Semua TV Analog, Catat Jadwalnya*. (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211207063707-37-297146/kominfo-siap-matikan-semua-tv-analog-catat-jadwalnya>). (Artikel diakses 30 Maret 2022).

- Inet.detik.com, *Mengenal Apa Itu Siaran TV Digital Pengganti TV Analog*, (<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5698186/mengenal-apa-itu-siaran-tv-digital-pengganti-tv-analog>). (Artikel diakses 15 Maret 2022).
- Jawapos.com, *Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital*, (<https://www.jawapos.com/opini/16/12/2020/manfaat-dan-tantangan-siaran-tv-digital/?amp>), (Artikel diakses 30 Maret 2022).
- Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Model*, (<https://kbbi.web.id/model>) (Artikel diakses 9 Maret 2022).
- Lektur.id, *"Pengelolaan" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (<https://lektur.id/arti-pengelolaan>) (Artikel diakses 15 Maret 2022).
- Siarandigital.kominfo.go.id, *Sejumlah Manfaat Beralih ke TV Digital*. (<https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/sejumlah-manfaat-beralih-ke-tv-digital>). (Artikel diakses 9 Maret 2022).